

INTISARI

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ *Unqualified Opinion*) yang telah diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sejak tahun 2011 tidak menjamin kesempurnaan dalam pengelolaan aset tetap dikarenakan setiap tahunnya masih terdapat catatan mengenai kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan manajemen aset yang telah diterapkan di Kabupaten Sleman yang dikoordinir oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman khususnya di Bidang Aset. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara dilakukan secara semi terstruktur sehingga pertanyaan penelitian disesuaikan dengan kondisi di BKAD Kabupaten Sleman. Partisipan terdiri dari pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aset/barang milik daerah. Pembahasan dituliskan berdasarkan evaluasi penerapan manajemen aset sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2018-2022, dan teori institusional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen aset di Kabupaten Sleman telah dilakukan sesuai prosedur, namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kendala manajemen aset yang disebabkan oleh belum lengkapnya dokumen penatausahaan aset, permasalahan sertifikasi tanah, terbatasnya sumber daya manusia, dan akibat permasalahan legal aset tetap.

Kata Kunci: *Manajemen Aset, Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Aset Tetap, Pengelolaan Barang Milik Daerah, SIMASET*

ABSTRACT

The Unqualified Opinion (WTP) that has been obtained by the Regional Government of Sleman Regency since 2011 does not guarantee perfection in the management of fixed assets because each year there are still notes regarding weaknesses in internal control and non-compliance with laws and regulations. This study aims to evaluate the implementation of asset management that has been implemented in Sleman Regency, which is coordinated by the Sleman Regency Regional Finance and Asset Agency, especially in the Asset Sector. The preparation of this research uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were obtained through interview techniques, observation and documentation. The type of interview was conducted in a semi-structured manner so that the research questions were adapted to the conditions at the BKAD of Sleman Regency. Participants consist of parties responsible for the management of regional assets/property. The analysis is written based on an evaluation of the implementation of asset management in accordance with the Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, the 2018-2022 BPK Audit Report, and institutional theory. The results of this study indicate that the implementation of asset management in Sleman Regency has been carried out according to the procedure, but in practice, there are still several problems in asset management caused by incomplete asset administration documents, land certification issues, limited human resources, and the result of fixed asset legal issues.

Keywords: *Asset Management, Unqualified Opinion, Fixed Assets, Regional Property Management, SIMASET*